

ABSTRAK

Indonesia di kenal dengan negara agraris yang Sebagian besar penduduk nya memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian, dalam lingkup pertanian maka pupuk sangat penting bagi pertumbuhan tanaman yang mana pupuk memberikan efek yang sangat besar bagi tanaman sehingga dapat menghasilkan buah yang sangat baik, beraneka ragam upaya pemerintah untuk meberikan fasilitas serta meningkatkan kualitas pada bidang pertanian khususnya pada bidang sector ketahanan pangan nasional, pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan mengenai pengadan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang di atur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesi Nomer 15/M-DAG/PER/4/2013, akan tetapi masih banyak peenyelewangian mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi dengan modus mendistribusikan pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggung jawabnya dengan modus meraup keuntungan yang lebih besar yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan bagi para petani oleh karena itu perbuatan tersebut harus di berikan sanksi yang sepadan apa yang di perbuat nya.

Metode penelitian hukum yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dengan cara menelaah berbagai undang undang yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang di lakukan dengan cara pendekatan kasus yang berkaitan dnegan isu hukum sedangkan bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan skunder.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya pelaku yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggungjawabnya dapat di mintai pertanggungjawaban serta dapat di kenakan sanksi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomer 77 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutann Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1 huruf b.

Kata Kunci: Pupuk Subsidi, Pendistribusian, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.7 Metode Analisis Bahan Hukum.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN PUPUL BERSUBSIDI, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, TINJAUAN UMUM MENGENAI PUPUK BERSUBSIDI	 12

2.1	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi Diluar Wilayah Tanggungjawabnya	12
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana Mendistribusikan Pupuk	12
2.1.2	Unsur – Unsur Tindak Pidana	14
2.2	Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	17
2.2.1	Pengertian Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana	17
2.2.2	Teori Pertanggung Jawaban Pidana	19
2.2.3	Unsur – Unsur Pertanggung Jawaban Pidana	19
2.2.3.1	Adanya Unsur Kesalahan Dari Suatu Tindak Pidana	21
2.2.3.2	Mampu Bertanggung Jawab	23
2.2.3.3	Adanya Alasan Penghapusan Pidana	23
2.3	Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Pupuk Bersubsidi	24
2.3.1	Pengaturan Pupuk Bersubsidi Dilihat Dari Hukum Ekonomi	24
2.3.2	Pengaturan Pupuk Bersubsidi Dilihat Dari Peraturan Menteri Perdagangan No 15/ M- DAG/2013	27
BAB III	TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH TANGGUNG JAWABNYA	33
3.1	Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Tanggung Jawabnya Merupakan Dari Tindak Pidana	33
3.2	Kemampuan Bertanggung Jawab Dalam Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Tanggung Jawabnya	43
3.3	Sanksi Bagi Pelaku Yang Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Wilayah Tanggung Jawabnya	49
BAB IV	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perbandingan Keaslian Skrip	7
Tabel 1.2 Harga Pupuk Bersubsidi.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tentang Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	32
Gambar 1.2 Tentang Perbandingan Harga Pupuk Subsidi Dan Non Subsidi	33